



## The effectiveness socialization of the Kurikulum Merdeka independently change in high schools Siak District

Wenny Fitria<sup>1</sup>, Dadang Sukirman<sup>2</sup>

<sup>1</sup>SMA Negeri 1 Tualang, Siak, Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia

[smansatualang@gmail.com](mailto:smansatualang@gmail.com)<sup>1</sup>, [dadangsukirman@upi.edu](mailto:dadangsukirman@upi.edu)<sup>2</sup>

### ABSTRACT

In the 2022/2023 school year, the Ministry of Education, Culture, and Research provides an opportunity for schools not Sekolah Penggerak to implement the Kurikulum Merdeka independently. Government support for schools that implement the IKM independently change is provided primarily by the Platform Merdeka Mengajar (PMM). In PMM, all information about the Kurikulum Merdeka is available and can be accessed by teachers and schools. Socialization of the Kurikulum Merdeka is no longer provided through training and education, but teachers and schools learn independently by accessing the platform. Although PMM is a breakthrough in the world of Indonesian education, the implementation at the education unit level still reaps the pros and cons. There are still many teachers in Indonesia who are unaware of this government program regarding PMM. Using a qualitative method, the author wants to know how the effectiveness of the socialization of the Kurikulum Merdeka through PMM in schools in Siak District that implement the Kurikulum Merdeka through independent change. The results showed that using PMM in these schools was not optimal, teachers preferred that the socialization be carried out face-to-face with a capabilities trainer.

### ARTICLE INFO

#### Article History:

Received: 18 Nov 2022

Revised: 14 Jan 2023

Accepted: 20 Jan 2023

Available online: 27 Jan 2023

Publish: 24 Feb 2023

#### Keyword:

Kurikulum Merdeka; Platform Merdeka Mengajar; socialization of the Kurikulum Merdeka

#### Open access

Inovasi Kurikulum is a peer-reviewed open-access journal.

### ABSTRAK

Pada tahun ajaran 2022/2023 Kemendikbudristek memberi kesempatan kepada sekolah yang bukan Sekolah Penggerak untuk menerapkan Kurikulum Merdeka secara mandiri. Dukungan utama yang diberikan pemerintah kepada sekolah yang menerapkan IKM jalur mandiri adalah dengan menyediakan Platform Merdeka Mengajar (PMM). Di PMM tersedia semua informasi tentang Kurikulum Merdeka yang bisa diakses oleh guru dan sekolah. Sosialisasi mengenai Kurikulum Merdeka tidak lagi diberikan melalui diklat-diklat dan pelatihan berjenjang, melainkan guru dan sekolah belajar mandiri dengan mengakses platform tersebut. Walaupun PMM merupakan terobosan baru di dunia pendidikan Indonesia, tetapi penerapan dan penggunaannya di lapangan, masih menuai pro dan kontra. Masih banyak guru-guru di Indonesia yang belum mengetahui program pemerintah mengenai PMM ini. Dengan menggunakan metode kualitatif, penulis ingin mengetahui bagaimana efektivitas sosialisasi Kurikulum Merdeka melalui PMM di sekolah-sekolah di Kabupaten Siak yang menerapkan Kurikulum Merdeka melalui jalur mandiri berubah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan PMM di sekolah-sekolah tersebut belum maksimal, masih banyak guru yang tidak mengetahui keberadaan PMM tersebut, guru-guru lebih memilih sosialisasi dilakukan secara tatap muka dengan narasumber yang mempunyai kapabilitas di bidangnya.

**Kata Kunci:** Kurikulum Merdeka; Platform Merdeka Mengajar; sosialisasi Kurikulum Merdeka

### How to cite (APA 7)

Fitria, W., & Sukirman, D. (2023). The effectiveness socialization of the Kurikulum Merdeka independently change in high schools Siak District. *Inovasi Kurikulum*, 20(1), 13-24.

### Peer review

This article has been peer-reviewed through the journal's standard double-blind peer review, where both the reviewers and authors are anonymised during review.

### Copyright

2023, Wenny Fitria, Dadang Sukirman. This an open-access is article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author, and source are credited. \*Corresponding author: [smansatualang@gmail.com](mailto:smansatualang@gmail.com)

## INTRODUCTION

Sebagai upaya dari pemulihan pembelajaran di Indonesia, pemerintah telah mengembangkan Kurikulum Merdeka yang fokus dan fleksibel serta diharapkan mampu mengembangkan karakter dan kompetensi peserta didik. Kemendikbudristek menjelaskan bahwa ada tiga karakter Kurikulum Merdeka, yang dapat mendukung pemulihan belajar, yaitu: (1) pembelajaran yang ditekankan kepada penguatan Profil Pelajar Pancasila yang diharapkan dapat membangun *softskill* dan karakter peserta didik, (2) fokus pada materi yang esensial, pembuat kebijakan sudah sedemikian rupa memilih capaian pembelajaran yang paling esensial bagi peserta didik, (3) adanya pembelajaran terdiferensiasi yang menyesuaikan dengan kemampuan peserta didik, serta penyesuaian kurikulum dengan konteks dan muatan lokal yang ada di satuan pendidikan (Baharuddin, 2021). Dalam implementasinya, pemerintah tidak menerapkan Kurikulum Merdeka secara serentak dan masif dikarenakan Kemendikbudristek memberikan kebebasan kepada satuan pendidikan untuk memilih kurikulum yang sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan. Dalam memberikan dukungan terhadap Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM), pada tahun 2021 pemerintah membuat program Sekolah Penggerak (SP) dan Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan (SMK-PK) sebagai sekolah yang menerapkan Kurikulum Merdeka. Dalam program SP dan SMK-PK, pemerintah memberi dukungan berupa pendampingan implementasi selama tiga tahun dan pengalokasian dana khusus. Alokasi dana khusus tersebut diperoleh melalui BOS Kinerja yang menurut Permendikbudristek Nomor 2 tahun 2022 BOS Kinerja dialokasikan bagi sekolah yang dinilai berkinerja baik dan berprestasi serta sekolah yang ditetapkan sebagai pelaksana program Sekolah Penggerak (Marisa, 2021).

Pada tahun 2022 Kemendikbudristek memperluas Implementasi Kurikulum Merdeka, kepada sekolah yang bukan Sekolah Penggerak melalui jalur mandiri dengan mengeluarkan keputusan Kepala BSKAP tentang Satuan Pendidikan Pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka melalui Jalur Mandiri pada Tahun Ajaran 2022/2023 Tahap II. Untuk pemilihan jalur mandiri, Kemendikbudristek membebaskan satuan pendidikan untuk menentukan pilihan jalur mandiri yang akan dipilih dengan menggunakan angket. Angket pendataan berisi pertanyaan-pertanyaan terkait kesiapan satuan pendidikan untuk menerapkan Kurikulum Merdeka. Angket kesiapan memberikan pilihan yang paling sesuai terkait kesiapan satuan pendidikan (Faiz, 2021). Pilihan yang pertama adalah Mandiri Belajar, satuan pendidikan diberikan kebebasan untuk mengaplikasikan beberapa prinsip Kurikulum Merdeka dengan tidak mengubah kurikulum yang diterapkan di satuan pendidikan. Pilihan kedua adalah Mandiri Berubah, di sini satuan pendidikan diberikan kebebasan untuk mengimplementasikan Kurikulum Merdeka dengan menggunakan perangkat ajar yang sudah disiapkan pemerintah. Dan pilihan ketiga adalah Mandiri Berbagi, yaitu satuan pendidikan mengimplementasikan Kurikulum Merdeka dengan mengembangkan perangkat ajarnya (Sabriadi, 2021).

Dari pemaparan Kemendikbudristek tentang IKM jalur mandiri, yang terjadi saat ini bukan hanya perubahan kurikulum, melainkan juga perubahan strategi Kemendikbudristek dalam implementasi kurikulum. Untuk IKM jalur mandiri, satuan pendidikan dapat memilih jalur mandiri yang sesuai dengan kesiapan di satuan pendidikan masing-masing. Sumber informasi pelatihan berasal dari satu sumber yaitu dari Platform Merdeka Mengajar, guru berpartisipasi aktif dalam mengikuti pelatihan menggunakan teknologi. Selain itu satuan pendidikan bisa mendapatkan Bimbingan Teknis dari pemangku kepentingan di daerah dan penguatan ekosistem komunitas belajar, dan melakukan pelibatan masyarakat melalui mitra pembangunan (Ramadina, 2021). Strategi implementasi dengan penggunaan platform secara daring ini dilakukan pemerintah sebagai upaya perbaikan sosialisasi kurikulum sebelumnya yang bertingkat, dimulai dari pelatihan narasumber nasional, instruktur nasional, kepala sekolah, pengawas, serta guru sasaran yang mengakibatkan banyaknya informasi tidak tersampaikan dan menyimpang yang diterima oleh satuan pendidikan dan guru sasaran. Pemerintah menilai beberapa kelebihan jika sosialisasi diberikan melalui platform, di antaranya: pertama, seluruh guru di Indonesia bisa mendapatkan kesempatan mengakses

pelatihan yang sama dengan kualitas yang sama. Kedua, setiap guru di Indonesia dapat saling berbagi praktik baik dan saling menginspirasi di platform yang sama. Ketiga, setiap guru di Indonesia dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan kecepatan masing-masing. Keempat, setiap guru di Indonesia dapat mengakses berbagai perangkat ajar yang bisa dijadikan contoh, atau dapat langsung dipakai. Kelima, setiap guru di Indonesia dapat saling berjejaring antarwilayah, dan keenam seluruh guru di Indonesia dapat memiliki kesempatan untuk pembaharuan dokumen (Baety, 2021). Tujuan penelitian ini adalah untuk memaparkan data empiris terkait IKM jalur mandiri berubah di SMA di Kabupaten Siak, khususnya terkait penggunaan Platform Merdeka Mengajar sebagai dukungan utama pemerintah dalam sosialisasi IKM, kemudian penulis menyampaikan saran terkait hasil penelitian berdasarkan literatur yang relevan.

## LITERATURE REVIEW

### Implementasi Perubahan Kurikulum

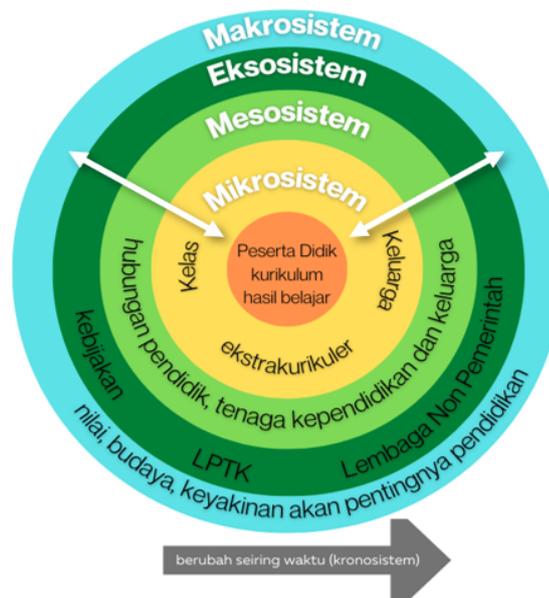
Implementasi perubahan kurikulum yang merupakan bagian dari perubahan kebijakan pendidikan, merupakan proses yang panjang dan kompleks. Implementasi kurikulum merupakan langkah pertama dari rangkaian kegiatan aplikasi kurikulum, yang nantinya akan dilanjutkan dengan kegiatan modifikasi, monitoring, dan evaluasi kurikulum. Print mengatakan bahwa di awal, implementasi kurikulum akan mengalami beberapa kendala. Kendala biasanya terletak pada kurang sistematisnya prosedur implementasi kurikulum sehingga tujuan dari para pengembang kurikulum tidak sampai kepada implementator kurikulum yaitu para pendidik (Ritonga, 2018). Kompleksitas implementasi kurikulum di tingkat daerah, yaitu satuan pendidikan, dan di kelas sering kali diabaikan oleh pembuat kebijakan sehingga tidak menghasilkan perubahan yang nyata di ruang kelas. Spillane menganalogikan proses sosialisasi kurikulum, dari pemerintah pusat hingga sampai kepada satuan pendidikan dan pendidik adalah seperti permainan “pesan berantai”, semakin banyak pemain yang terlibat, semakin besar peluang terjadinya penyimpangan atau deviasi pesan yang diterima pemain terakhir (Suhardi, 2020). Dalam implementasi kurikulum, proses sosialisasi kurikulum lebih kompleks dari sekadar pesan berantai karena satuan pendidikan dan pendidik, sebagai pemain terakhir, bisa saja menerima informasi yang berbeda-beda dari pemain sebelumnya, dalam hal ini pengawas, pemerintah daerah, bahkan pemerintah pusat. Dalam kajiannya tentang respons sekolah-sekolah di Amerika dalam menghadapi perubahan kurikulum, reaksi dan respons yang berbeda akan selalu muncul dalam menghadapi perubahan kurikulum. Penyesuaian diri bukanlah hal yang mudah sehingga sering memunculkan permasalahan baru di satuan pendidikan. Pada hakikatnya proses seperti itu adalah wajar karena merupakan bagian dari proses pembelajaran (Alimni, 2018).

Stephen Ball dan kawan-kawan mengatakan bahwa kegagalan dalam implementasi kurikulum, sering kali diatasi dengan membuat aturan baru, tetapi tidak mengubah strategi pengimplementasiannya. Pembuat kebijakan berasumsi bahwa kebijakan kurikulum baru yang dibuat sangat kuat pengaruhnya dan akan dapat mengubah perilaku dan cara pandang pendidik, sehingga satuan pendidikan dan pendidik akan menerapkan kebijakan baru tersebut dengan baik, tanpa memedulikan bagaimana kebijakan tersebut disosialisasikan dan dikelola di satuan pendidikan (Pratiwi, 2019). Sementara itu Taylor menyatakan bahwa langkah terukur yang bisa dikendalikan pemerintah adalah membuat kebijakan, sementara hal-hal yang terjadi di lapangan bukan dalam kendali mereka. Wilcox dan kawan-kawan mengatakan ini sebagai “*the more things change, the more they remain the same*” dengan kata lain semakin banyak perubahan yang terjadi, semakin banyak hal yang tidak berubah. Dokumen kurikulum selalu saja berubah, tetapi implementasinya dari tahun ke tahun tetap menjadi masalah yang belum menemukan solusinya (Rahayu, 2017).

## Pendekatan Sistem Ekologi

Dari tinjauan berbagai sumber mengenai model pengembangan kurikulum, implementasi kurikulum sering kali dianggap sebagai proses yang linear (satu arah), baik *bottom-up* maupun *top-down*. *Bottom up* adalah perubahan yang berasal dari akar rumput yang berujung pada perubahan kebijakan, sedangkan *top-down* merupakan arahan atau instruksi yang berasal dari pusat kemudian diturunkan kepada kepala daerah, satuan pendidikan dan akhirnya kepada pendidik (Salsabila, 2018). Beberapa pakar mempunyai pandangan lain, menurut mereka implementasi kebijakan merupakan hubungan yang kompleks antara kebijakan yang dikeluarkan pusat, dengan respons yang muncul dari bawah (satuan pendidikan), serta perubahan yang terjadi akibat reaksi dari keluarga, masyarakat, dan disuarakan oleh media. Dengan demikian implementasi perubahan kurikulum merupakan proses yang tidak statis, tidak linear, dan dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan berbagai pihak (Kholis, 2017).

Model sistem ekologi Bronfenbrenner yang mengilustrasikan bagaimana keterkaitan lingkungan dan pengaruhnya terhadap perkembangan anak, diadaptasi oleh OECD yang mengembangkan sistem ekologi di dunia pendidikan untuk melihat bagaimana pengaruh pihak-pihak terkait dalam keberhasilan implementasi perubahan kurikulum dan melihat hubungan berbagai pemangku kepentingan di level yang berbeda (Muhyatun, 2019). Model sistem ekologi mengenai implementasi kurikulum tergambar dalam **Gambar 1**. Terlihat bahwa peserta didik adalah pusat dari implementasi kurikulum, segala upaya yang dilakukan terkait implementasi kurikulum, bertujuan untuk perbaikan karakter dan pengembangan keterampilan peserta didik. Prinsip yang berpusat kepada peserta didik ini, digunakan dalam merancang desain, maupun implementasi kurikulum (*learner-centered curriculum*).



**Gambar 1.** Pendekatan Sistem Ekologi Untuk Implementasi Kurikulum  
Sumber: Muhyatun (2019)

Aspek pertama yang berpengaruh adalah mikrosistem, yaitu aspek yang berinteraksi langsung dengan peserta didik. Hal yang termasuk ke dalam lingkungan mikrosistem adalah kelas (guru, kegiatan pembelajaran, dan teman sebaya), kegiatan ekstrakurikuler dan juga lingkungan keluarga. Selanjutnya adalah mesosistem, yang merupakan interaksi antara elemen-elemen di sekolah seperti pendidik, tenaga pendidikan dan keluarga. Komunikasi, budaya kerja yang saling terbuka, saling percaya antar berbagai elemen tersebut adalah hal yang krusial dalam pengimplementasian kurikulum. Sikap saling percaya dan terbuka antara orangtua dan peserta didik juga berdampak positif terhadap implementasi kurikulum di satuan pendidikan (Fahrudi, 2021). Aspek selanjutnya adalah eksosistem, yang terdiri dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, yang mengeluarkan aturan-aturan pendidikan yang berpengaruh langsung

terhadap implementasi kurikulum. Kebijakan yang dikeluarkan perlu diselaraskan dengan implementasi kurikulum. Contohnya adalah kebijakan tentang jumlah jam mengajar guru yang bisa berubah karena perubahan struktur kurikulum, jangan sampai merugikan guru dalam penerimaan tunjangan sertifikasi, atau harus membuat guru mencari jam mengajar di sekolah lain untuk pemenuhan jam mengajarnya. Contoh lain adalah penggunaan dana bantuan BOS yang perlu diselaraskan dengan kegiatan di sekolah seperti pembelajaran intrakurikuler dan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Peranan organisasi non-pemerintah, dunia usaha dan industri, dan universitas juga sangat mempengaruhi implementasi kurikulum di tingkat satuan pendidikan (Kurniati, 2021).

Aspek terluar yang mempengaruhi implementasi kurikulum adalah makrosistem, ideologi, nilai, adat dan budaya yang ada di masyarakat berpengaruh terhadap sistem pendidikan, proses pendidikan dan lingkungan. Bjork dalam studinya di Jepang menemukan bahwa kebijakan menyederhanakan muatan dan konten pembelajaran, melalui pembelajaran terpadu misalnya, yang ditujukan bagi penguatan kompetensi dan kesejahteraan peserta didik tidak sejalan dengan pandangan orang tua dan pendidik. Pengurangan beban belajar diharapkan dapat mengurangi kelelahan fisik maupun mental peserta didik di Jepang (Hanubun, 2020). Sementara menurut pendidik dan orang tua, yang paling penting dalam pendidikan menengah (SMA), ialah kompetensi mumpuni peserta didik yang dapat digunakan untuk mengikuti tes masuk perguruan tinggi yang diminati. Untuk itu, kebijakan mengurangi beban belajar peserta didik tersebut justru dianggap kurang produktif. Ketidakselarasan antara kebijakan kurikulum dengan paradigma merupakan tantangan sistem makro dalam perubahan kurikulum (Nasution, 2021).

Hal lain yang juga berpengaruh terhadap implementasi kurikulum adalah kronosistem yang merupakan aspek yang berkaitan dengan waktu. Dalam melakukan perubahan kurikulum, pendidik membutuhkan waktu untuk memahami, memproses, dan mengimplementasikan perubahan kurikulum yang terjadi. Pendidik akan merasa frustrasi dan menolak perubahan jika tidak diberikan waktu yang cukup untuk melakukan perubahan tersebut (Junaidi, 2019). Selain itu kronosistem juga terkait dengan sejarah perubahan kurikulum yang terjadi dari waktu ke waktu. Dalam implementasi kurikulum, model sistem ekologi dapat digunakan dalam mengidentifikasi permasalahan dalam implementasi serta menentukan strategi yang lebih tepat dan menyeluruh. Spillane menyampaikan bahwa dengan menggunakan sudut pandang sistem ekologi, perancang kurikulum hendaknya bisa mengidentifikasi hal yang berpengaruh terhadap pengetahuan, pemaknaan, serta keputusan pendidik dan juga kepala sekolah dalam menanggapi kebijakan baru yang harus mereka terapkan. Ini disebut dengan proses *sensemaking* (pemaknaan kebijakan) (Setiawan, 2020).

### **Memaknai Kurikulum di Akar Rumput**

Pendidik dalam hal ini guru adalah kunci utama keberhasilan implementasi kurikulum. Pendidik merencanakan, melaksanakan, menilai, dan mengembangkan pembelajaran dengan peserta didik sebagai pusatnya, mereka akan melakukan proses pemaknaan terhadap kebijakan, serta dokumen kurikulum lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kompleksitas dari implementasi kurikulum mulai terjadi semenjak pelaku kebijakan di akar rumput seperti pendidik, kepala sekolah dan pemerintah daerah memaknai sebuah kebijakan (*sensemaking*) kemudian menginterpretasikannya sesuai dengan pemahamannya (Asri, 2017). Proses pemaknaan kebijakan oleh pendidik tersebut setidaknya memberitahu kita tentang hal berikut: pertama, pendidik merupakan pihak yang mempunyai kendali dalam pengimplementasian kurikulum (*teacher agency*). Dengan kendali yang dimiliki tersebut, pendidik dapat secara aktif menginterpretasikan kemudian membuat keputusan bagaimana mereka akan merespons kebijakan yang sudah mereka terima. Pendidik mempunyai kendali apakah mereka akan melaksanakan persis seperti yang tertuang dalam kebijakan pemerintah, atau memodifikasinya sesuai keadaan yang dihadapi di kelas nyata, atau tidak peduli dengan kebijakan baru dan tetap menggunakan kebijakan yang lama. Kedua, proses pemaknaan/ penginterpretasian kebijakan memang dilaksanakan di tingkat satuan

pendidikan oleh pendidik, tetapi proses ini tidak hanya melibatkan elemen yang ada di satuan pendidikan (mesosistem), tetapi juga memerlukan dukungan dari pemerintah dan mitra lain (eksosistem) yang dapat memfasilitasi pendidik mempelajari kebijakan baru tersebut (Insani, 2019). Pada sisi lain, hambatan dan tantangan dalam implementasi kurikulum juga merupakan pengaruh dari aspek eksosistem dan makrosistem. Pandangan skeptis masyarakat terhadap adanya perubahan kurikulum juga berpengaruh terhadap proses pemaknaan. Terkadang pendidik dan kepala sekolah terpengaruh dan mengikuti pandangan tersebut karena ada kekhawatiran jika mereka kehilangan kepercayaan publik jika tetap mengikuti arahan pengampu kebijakan dalam mengimplementasi perubahan kurikulum (Sumantri, 2019).

Kuasa yang dimiliki seorang pendidik (*teacher agency*) menunjukkan bahwa mereka adalah birokrat yang bekerja di akar rumput (*street-level bureaucrats*). Sebagai pemegang birokrasi di akar rumput, pendidik memiliki kuasa untuk menilai perolehan Capaian Pembelajaran (CP) dari suatu pembelajaran. Apakah CP dapat mengembangkan kompetensi siswa secara efektif seperti yang diharapkan. Kebijakan nyata atau kebijakan sebenarnya adalah kebijakan atau keputusan yang dibuat pendidik dan satuan pendidikan setelah melakukan serangkaian pemaknaan dan perencanaan (Dewi, 2019). Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh birokrat akar rumput tidak selalu selaras dengan kebijakan dari pusat, hal ini tidak lantas disimpulkan sebagai penentangan kepada arahan pusat. Ketidakselarasan bisa muncul karena situasi di lapangan yang kompleks sehingga tidak memungkinkan untuk mengikuti arahan pemerintah pusat. Menurut Lipsky dan Spillane, profesi fungsional seperti pendidik, tenaga kesehatan, pekerja sosial, polisi, dan pekerjaan lain yang berhubungan langsung dengan khalayak adalah profesi yang paling sering tidak memenuhi ekspektasi pemerintah pusat, terutama dalam hal implementasi kebijakan karena situasi lapangan yang kompleks. Seringkali keputusan yang diambil oleh birokrat akar rumput berbeda dengan kebijakan yang diperintahkan oleh pusat karena situasi di lapangan membuat mereka sulit untuk mengaplikasikan kebijakan tersebut sehingga mereka hanya mengimplementasikan kebijakan yang tampak saja (Dhaifi, 2017). Pada awalnya pendidik dan satuan pendidikan diharapkan dapat mengimplementasikan kebijakan dengan mengikuti arahan baik teknis dan non-teknis sepenuhnya. Namun, berkaca kepada besarnya kekuasaan yang dimiliki para birokrat akar rumput dan kompleksnya tantangan implementasi kurikulum berbagai negara dari waktu ke waktu, pendekatan itu semakin ditinggalkan oleh banyak negara, tren strategi kebijakan implementasi kurikulum saat ini tidak lagi menggunakan strategi implementasi taat (*implementation fidelity*), tetapi lebih kepada implementasi dengan integritas (*implementation integrity*) (Daga, 2020).

## Budaya Sistem Pendidikan Indonesia

Sebelumnya telah dibahas tentang kompleksitas implementasi perubahan kurikulum dari segi psikologi sosial, kuasa guru (*teacher agency*) dan proses pemaknaan (*sensemaking*) menjadi faktor penting dalam implementasi kurikulum. Hal yang menjadi tantangan implementasi kurikulum adalah aspek seperti yang disebutkan sebelumnya dalam model sistem ekologi, yaitu budaya (makrosistem) dan sejarah (kronosistem). Hal ini senada dengan yang disampaikan Benavot & Resh bahwa salah satu tantangan implementasi juga dapat disebabkan oleh makrosistem yaitu budaya dan nilai yang dianut masyarakat. Terkadang masyarakat memiliki pendapat dan standar tersendiri, mengenai bagaimana pengelolaan pendidikan seharusnya dikelola (Alifah, 2021). Bjork meneliti tentang seberapa besar pengaruh makrosistem Indonesia terhadap implementasi kurikulum yang berlaku di Indonesia, dan bagaimana penerapan muatan lokal di satuan pendidikan (SMP di pulau Jawa). Bjork mengkaji tentang bagaimana respons daerah dan satuan pendidikan. Sistem desentralisasi pendidikan yang dianut di Indonesia telah memberikan peluang kepada pendidik dan satuan pendidikan dapat berperan lebih dalam pengembangan kurikulum. Pemda diminta untuk melibatkan pendidik dan juga masyarakat sekitar dalam menyusun kurikulum untuk pembelajaran kontekstual yang relevan dengan lingkungan sekitar. Namun, kebijakan pelibatan tersebut kurang mendapat tanggapan yang baik dari pengambil kebijakan di akar rumput, daerah

tidak siap dengan perubahan yang ditawarkan pemerintah tersebut. Dengan menggunakan sudut pandang budaya, politik, dan sejarah perkembangan sistem pendidikan di Indonesia, Bjork menemukan masalah ketidakselarasan antara budaya politik dalam sistem pendidikan Indonesia, dengan sistem desentralisasi yang menjadi kebijakan pemerintah pusat saat itu. Selama ini, tidak pernah dibangun budaya partisipatif dalam perencanaan kebijakan di tingkat lokal, sistem pendidikan diselenggarakan secara tertutup, pendidik hanya mengikuti arahan pemerintah pusat. Ketika sistem desentralisasi mulai diterapkan di awal tahun 2000-an, daerah merasa canggung karena diberikan sesuatu yang baru dan asing dengan budaya institusi pendidikan yang selama ini dipegang. Pemerintah tidak memberikan pemahaman yang baik kepada pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan pendidik untuk memegang kendali dalam kurikulum. Kesiapan tersebut bukan sekadar tentang kemampuan kognitif saja, tetapi juga kesiapan secara budaya. Walaupun perubahan itu sudah terjadi puluhan tahun, namun hingga saat ini belum ada perubahan cara pandang pemerintah daerah tentang desentralisasi, kecuali hanya dalam tataran administrasi saja (Anam, 2017).

Almond dan Verba menyebutkan bahwa keselarasan antara budaya politik dengan kebijakan haruslah tercipta. Kebijakan yang tidak selaras dengan budaya politik makro, tidak akan dapat bertahan lama dalam tahap implementasinya, kebijakan hanya akan diimplementasi dalam waktu yang singkat, dan kemudian kembali lagi kepada tradisi lama. Menurut Bjork, sistem sentralisasi yang selama ini berlaku di sistem pendidikan Indonesia, yang menekankan pentingnya ketaatan pada pimpinan dan aturan dari pusat, membuat ekspektasi pemerintah tidak terwujud, konsep otoritas lokal untuk mengembangkan kurikulum masih asing dan tidak familiar bagi pendidik dan tenaga kependidikan di tingkat lokal. Temuan Bjork ini merupakan tantangan dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka yang mengutamakan kebebasan satuan pendidikan dan guru untuk dapat secara mandiri dan aktif mengembangkan dan mengelola kurikulum di satuan pendidikannya. Walaupun penelitian tersebut dilakukan belasan tahun yang lalu, tetapi strategi Implementasi Kurikulum Merdeka tetap harus memperhatikan aspek budaya makro ini karena budaya berubah relatif lambat (Riska, 2021).

### **Strategi Implementasi Kurikulum Merdeka**

Pemaknaan kebijakan dari pusat dan proses pengambilan keputusan atau kebijakan yang diimplementasikan di satuan pendidikan tetap akan dilakukan terlepas adanya arahan pemerintah pusat atau tidak. Dengan artian, ada atau tidaknya dukungan pemerintah, proses adaptasi kebijakan di satuan pendidikan khususnya di kelas akan tetap dilakukan. Oleh sebab itu, agar proses sesuai dengan tujuan kurikulum yang baru, maka pemerintah perlu menyusun strategi pengimplementasian kurikulum dengan melihat kompleksitas implementasi di tingkat daerah, di satuan pendidikan, dan juga di pembelajaran yang sempat terkendala oleh pandemi COVID-19. Dalam merancang strategi Implementasi Kurikulum Merdeka perlu diperhatikan strategi implementasi yang sudah pernah diterapkan baik di Indonesia maupun di negara lain (Supriyadi, 2021). Dalam menentukan Strategi Implementasi Kurikulum Merdeka, perlu juga memperhatikan prinsip-prinsip perancangan kurikulum, yaitu: (1) sederhana, mudah untuk dipahami dan dilaksanakan; (2) difokuskan pada kompetensi dan karakter peserta didik; (3) fleksibel, mudah untuk diadaptasikan; (4) selaras, sejalan dengan perkembangan zaman; (5) bergotong royong, mengandalkan kolaborasi; dan (6) memperhatikan hasil analisis dan *feedback*. Ada tiga hal penting yang hendaknya betul-betul disadari oleh pendidik dan satuan pendidikan dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka, yaitu: (1) Menerapkan Kurikulum Merdeka merupakan pilihan, satuan pendidikan dapat leluasa memutuskan apakah akan menerapkannya sebagai salah satu usaha dalam mengatasi *loss learning* atau tidak. (2) Implementasi kurikulum merupakan proses pembelajaran bagi pendidik dan satuan pendidikan sesuai dengan tahapan kesiapan mereka dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka. Hal ini mengakibatkan penerapan kurikulum antar satu satuan pendidikan tidaklah sama dengan satuan pendidikan yang lain. Ketiga, menurut teori Bronfenbrenner dukungan terhadap implementasi kurikulum

haruslah dilaksanakan secara menyeluruh, intervensi hendaknya dilakukan kepada faktor yang mendukung implementasi secara langsung atau tidak (Feriver et al., 2022; Irawati et al., 2022). Beberapa strategi yang dilakukan pemerintah sebagai tindak lanjut dari IKM jalur mandiri adalah: (1) membantu satuan pendidikan mengukur kesiapannya dalam memilih jalur Implementasi Kurikulum Merdeka, (2) memfasilitasi satuan pendidikan dengan konten perangkat ajar dan penilaian dalam format digital, (3) memberikan pelatihan mandiri secara daring (4) merekomendasikan narasumber Kurikulum Merdeka dari SP/SMK-PK yang sudah melaksanakan IKM, dan (5) memfasilitasi pengembangan Komunitas Belajar (Supriyadi, 2021).

## METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif metode deskriptif, proses pengambilan data dilakukan melalui wawancara kepada informan yang merupakan pendidik yang mengajar di kelas X di SMA di Kabupaten Siak Provinsi Riau yang menerapkan IKM jalur mandiri berubah. Menurut Creswell, penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang dapat menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi secara faktual. Objek penelitian ini berupa dokumen atau data yang berkaitan dengan IKM jalur mandiri berubah khususnya mengenai data kesiapan pendidik mengimplementasikan Kurikulum Merdeka di pembelajaran di kelas. Pengumpulan data yang penulis gunakan adalah metode deskriptif analisis yang tidak hanya menguraikan hasil temuan melainkan memberikan penjelasan dan pemahaman terkait objek penelitian (Kaharuddin, 2021).

## RESULTS AND DISCUSSION

### Satuan Pendidikan dalam Memaknai IKM Mandiri

Dengan dikeluarkannya keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen tentang Satuan Pendidikan Pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka Melalui Jalur Mandiri pada Tahun Ajaran 2022/2023 Tahap II. Maka satuan pendidikan yang bukan merupakan Sekolah Penggerak diberikan keleluasaan untuk menentukan pilihan jalur mandiri yang akan dipilih sesuai kesiapannya, dengan mengisi angket yang dikeluarkan oleh Kemendikbud. Terdapat sejumlah indikator yang dapat menggambarkan kesiapan satuan pendidikan untuk menerapkan Kurikulum Merdeka. Dengan mengisi angket kesiapan, maka satuan pendidikan dapat melihat tingkat kesiapan sekolah dan memilih jalur Implementasi Kurikulum Merdeka yang paling tepat dengan kondisi satuan pendidikan, sehingga diharapkan pelaksanaan Kurikulum Merdeka akan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Jika satuan pendidikan merasa belum cukup siap untuk menerapkan Kurikulum Merdeka, maka satuan pendidikan tersebut dapat menerapkan Kurikulum Merdeka pada tahun ajaran berikutnya. Dengan fleksibilitas yang diberikan, diharapkan satuan pendidikan dapat mempersiapkan diri untuk melakukan perubahan yang besar dalam implementasi kurikulum. Penting bagi satuan pendidikan untuk mendapatkan waktu yang cukup dalam mempersiapkan diri untuk mengimplementasikan kurikulum. Satuan pendidikan dapat melakukan observasi terlebih dahulu mengenai kurikulum baru, sebelum mengimplementasikannya sendiri.

Dalam pelaksanaannya, sebagian satuan pendidikan mengisi angket sesuai dengan kenyataan yang ada di satuan pendidikan, akan tetapi tidak sedikit satuan pendidikan yang mengisi angket dengan melakukan manipulasi data dengan harapan agar satuan pendidikan tersebut dapat direkomendasikan untuk melaksanakan Kurikulum Merdeka dengan jalur Mandiri Berubah ataupun jalur Mandiri Berbagi. Di satu sisi, *stakeholder* di satuan pendidikan belum siap mengimplementasikan perubahan kurikulum, tetapi di sisi lain satuan pendidikan juga tidak ingin ketinggalan dalam melaksanakan kebijakan terbaru pemerintah, satuan pendidikan memilih untuk melakukan perubahan secara perlahan-lahan dimulai dari sekarang dengan mempelajari perubahan kurikulum sambil mempraktikkannya di lapangan, daripada

nanti di tahun 2024 mempelajari Kurikulum Merdeka dalam tempo yang singkat. Sulit bagi sebuah satuan pendidikan untuk mempelajari/ mengobservasi sebuah kurikulum, jika kurikulum tersebut tidak dipakai di satuan pendidikan tersebut. Hal ini dikarenakan satuan pendidikan disibukkan oleh kegiatan pengimplementasian kurikulum yang berlaku sehingga belajar mengenai kurikulum lain tidak menjadi prioritas.

Implementasi Kurikulum Merdeka bagi sekolah yang memilih jalur mandiri berubah, sudah dilaksanakan sejak semester ganjil tahun ajaran 2022/2023. Sesuai arahan Kemendikbudristek, sekolah yang belum siap dari segi administrasi, bisa menggunakan perangkat ajar yang sudah disiapkan oleh pemerintah dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka. Perangkat ajar yang saat ini sudah disiapkan pemerintah di Platform Merdeka Mengajar adalah modul ajar atau RPP+ dan buku teks yang diperuntukkan bagi guru dan murid. Guru bebas menggunakan modul ajar dan buku teks yang sesuai dengan karakteristik peserta didik yang dihadapi, guru juga dapat memodifikasi modul ajar tersebut agar sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Berdasarkan. Dalam paparan Kemendikbudristek mengenai enam dukungan pemerintah dalam implementasi kurikulum, bahwa selain perubahan kurikulum Kemendikbudristek juga mengubah strategi pelatihan sosialisasi Kurikulum Merdeka. Pelatihan dilakukan dengan partisipasi aktif dari pemangku kepentingan, dalam hal ini pendidik dan kepala sekolah untuk mengikuti pelatihan mandiri melalui Platform Merdeka Mengajar. Guru secara partisipatif menggunakan teknologi, serta terlibat dalam komunitas belajar, agar dapat memahami Kurikulum Merdeka dengan baik. Arahan penggunaan strategi ini diperkuat dengan adanya surat edaran dari Dirjen GTK yang ditujukan kepada Kadisdik Provinsi, Kadisdik Kabupaten/Kota, kepala sekolah, dan pendidik agar sekolah berpartisipasi aktif untuk mempelajari Kurikulum Merdeka dengan memanfaatkan semua fitur yang ada di Platform Merdeka Mengajar.

Dalam praktik Implementasi Kurikulum Merdeka jalur mandiri berubah di lapangan, Platform Merdeka Mengajar tidak serta merta dapat melunaskan kewajiban pemerintah dalam memberikan dukungan kepada satuan pendidikan. Dari 29 narasumber yang menjadi partisipan, ketika dimintai pandangan mereka mengenai sosialisasi Kurikulum Merdeka, 25 di antaranya meminta agar sosialisasi kurikulum secara tatap muka lebih sering diadakan, agar proses pemaknaan kurikulum dapat berjalan dengan baik, empat narasumber lain memberikan tanggapan yang berbeda, satu di antaranya lebih menyoroti pada video yang terlalu banyak, kemudian satu orang lagi yang menyoroti waktu pelatihan yang tidak tepat dan dua orang lain mengatakan bahwa sosialisasi dengan menggunakan PMM sudah baik. Dari data yang diperoleh terlihat bahwa pendidik masih mengharapkan pelatihan yang dilakukan secara luring (*on site*), beberapa pendidik beralasan bahwa sulit meluangkan waktu khusus untuk mengikuti pelatihan di Platform Merdeka Mengajar. Pemerintah memang memberikan keleluasaan bagi pendidik untuk mengikuti pelatihan mandiri kapan dan di manapun, akan tetapi meluangkan waktu khusus untuk mengikuti pelatihan di luar jam sekolah bukanlah hal mudah bagi pendidik sehingga banyak pendidik yang mengikuti pelatihan sembari mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan rutinitas yang lain. Selain itu ada juga pendidik yang mengikuti pelatihan, tanpa menyimak video, kemudian ia menjawab asesmen dengan mengikuti jawaban yang sudah beredar di internet. Bagaimana pemaknaan (*sense making*) kurikulum akan berjalan dengan baik, sementara sosialisasinya saja tidak bermakna untuk pendidik. Berbeda halnya jika pelatihan dilakukan secara luring, mau tidak mau pendidik akan berada pada tempat dan waktu yang khusus sehingga lebih fokus untuk mengikuti pelatihan.

Alasan lain yang dikemukakan adalah materi pelatihan di PMM bersifat teoritis dan sangat umum. Pendidik kesulitan menghubungkan teori yang diberikan dengan konteks yang mereka hadapi di lapangan, terutama bagaimana mengaitkannya dengan pembelajaran yang sesuai dengan mata pelajaran yang mereka ampu. Apalagi banyak konsep-konsep baru yang diperkenalkan, yang tentu saja membutuhkan bimbingan dari pihak yang berkompeten agar penafsiran pendidik tentang konsep baru tersebut tidak keliru. Konsep pembelajaran terdiferensiasi misalnya, konsep ini benar-benar baru bagi pendidik. Pembelajaran berdiferensiasi mengakomodasi peserta didik berdasarkan kebutuhannya. Memberikan

perlakuan yang berbeda kepada peserta didik dalam satu kelas dari segi konten, proses dan produk sudah nampak pelik jika hanya dipelajari dengan membaca modul atau memahami dari video saja. Terlebih contoh praktik pembelajaran berdiferensiasi di lapangan sangat kurang. Guru kesulitan mengonversikan pembelajaran berdiferensiasi yang dicontohkan pada suatu mata pelajaran, ke mata pelajaran yang diampu, karena karakteristik pembelajaran tiap mata pelajaran tidaklah sama. Alih-alih menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, yang ada hanyalah keluhan dan kritikan dari guru mengenai susah dan tidak masuk akal nya melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas Indonesia yang jumlah siswa dalam satu kelasnya cukup besar. Beberapa narasumber menyebutkan alasan mereka lebih memilih pelatihan luring adalah karena merasa sudah jenuh dengan penggunaan laptop ataupun gadget dalam masa pandemi. Penggunaan laptop dan gadget yang rutin semasa pandemi telah mengakibatkan gangguan kesehatan seperti kerusakan pada mata dan sakit kepala. Untuk itu sebisa mungkin mereka akan mengurangi kontak dengan kedua perangkat andalan ini. Dari pengamatan di lapangan, beberapa berprinsip bahwa selama belum diwajibkan oleh atasan, dan tidak berpengaruh terhadap penilaian maupun tunjangan, maka sesuatu belum urgen untuk dikerjakan sehingga beberapa guru yang mengajar di kelas X di sekolah dengan jalur IKM Mandiri Berubah, belum pernah sama sekali mengikuti pelatihan tentang Kurikulum Merdeka baik di PMM maupun secara luring. Inilah seperti yang disebutkan oleh Wilcox dan kawan-kawan dengan "*the more things change, the more they remain the same*" dengan kata lain semakin banyak perubahan, semakin banyak hal yang tidak berubah.

## Discussion

Platform Merdeka Mengajar (PMM) adalah terobosan yang sangat bagus di dunia pendidikan Indonesia, akan tetapi terlalu dini jika pemerintah hanya mengandalkan PMM ini untuk memberikan pengetahuan tentang Kurikulum Merdeka bagi satuan pendidikan yang memilih jalur Mandiri Berubah. Diklat-diklat dan workshop mengenai IKM secara luring masih sangat dibutuhkan karena setelah memaknai kurikulum baru, guru masih harus mengonfirmasikan pemahamannya tersebut kepada para ahli kurikulum, agar tidak terjadi kesalahan penafsiran dalam menerapkan kurikulum baru tersebut. Selain mengonfirmasi pemahaman, guru juga perlu melakukan *peer teaching* Kurikulum Merdeka dengan guru selingkung, sebelum mempraktikkannya di kelas nyata. Berkaca juga dari hasil penemuan Bjork bahwa pola pikir pendidik di Indonesia sangat diwarnai oleh sejarah panjang sistem pendidikan Indonesia, sistem sentralisasi sangat menekankan pentingnya kepatuhan kepada arahan pemerintah pusat. Guru lebih siap untuk mentransmisi (menghantarkan, meneruskan) ilmu pengetahuan dan nilai-nilai kebangsaan kepada peserta didik, dibandingkan dengan mentransformasi (mengubah) sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Maka sebelum mensosialisasikan kurikulum baru, pemerintah hendaknya mensosialisasikan terlebih dahulu kepada guru tentang adanya *teacher agency* dalam pendidikan, bahwa guru mempunyai kendali terhadap kurikulum yang akan diterapkan di satuan pendidikan masing-masing. Merujuk kembali Spillane dan kawan-kawan, bahwa proses pemaknaan kebijakan dipengaruhi oleh lingkungan pendidik sebagai ujung tombak pelaksana kebijakan. Ketika pendidik dibiarkan dengan paradigma lamanya, tetapi dipaksakan mengikuti kebijakan baru, maka akibat yang sering muncul adalah adanya implementasi kurikulum yang dangkal, pendidik menerapkan kurikulum yang baru, tetapi masih menggunakan paradigma lama. Kata kunci di sini adalah menyiapkan pendidik. Tidak akan ada perubahan kurikulum yang terjadi jika pendidik tidak siap, sebab kunci perubahan adalah pendidik itu sendiri (Oke & Fernandes, 2020; Pratiwi, 2019).

## CONCLUSION

Sebagai upaya dari pemulihan pembelajaran di Indonesia, pemerintah telah mengembangkan Kurikulum Merdeka yang dinilai lebih fleksibel, fokus kepada materi esensial, serta diharapkan mampu

mengembangkan karakter dan kompetensi peserta didik. Dalam menerapkan Kurikulum Merdeka satuan pendidikan diberikan kebebasan untuk memilih jalur mandiri yang akan diterapkan di satuan pendidikan, ada tiga pilihan jalur mandiri, yaitu mandiri belajar, mandiri berubah dan mandiri berbagi. Pada penelitian ini penulis mengamati beberapa SMA di Kabupaten Siak yang memilih jalur Mandiri Berubah. Hal yang menjadi sorotan bagi pendidik di sekolah tersebut adalah sosialisasi Kurikulum Merdeka yang dilakukan secara daring melalui Platform Merdeka Mengajar (PMM). Penggunaan PMM masih belum maksimal karena ada beberapa kendala yang terjadi di lapangan. Kendala tersebut antara lain: pendidik kesulitan mengalokasikan waktu mengikuti pelatihan mandiri di luar jam sekolah, pembelajaran di PMM bersifat teoritis dan sangat umum sehingga pendidik kesulitan mengaplikasikannya dalam pembelajaran, sudah jenuh dengan penggunaan laptop dan HP dalam pembelajaran. Untuk itu pendidik berharap agar dalam sosialisasi kurikulum pelatihan atau sosialisasi dapat dilakukan secara tatap muka. Penelitian Bjork tentang karakteristik masyarakat Indonesia yang cenderung mengikuti alur dan memegang prinsip kepatuhan, menjadikan tantangan dalam implementasi kurikulum. Pemerintah hendaknya menyadarkan terlebih dahulu guru-guru di Indonesia dengan adanya kuasa/ kendali pada guru dalam menerapkan kurikulum di kelasnya (*teacher agency*) sehingga guru akan aktif mengembangkan dirinya untuk memberikan yang terbaik di kelas nyatanya.

### AUTHOR'S NOTE

Penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan terkait publikasi artikel ini. Penulis menegaskan bahwa data dan isi artikel bebas dari plagiarisme.

### REFERENCES

- Alifah, S. (2021). Peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia untuk mengejar ketertinggalan dari negara lain. *Cermin: Jurnal Penelitian*, 5(1), 113-123.
- Alimni, A. (2018). Analisis sosiologi perubahan kurikulum madrasah 2013. *At-ta'lim: Media Informasi Pendidikan Islam*, 17(2), 181-190.
- Anam, S. (2017). Karakteristik dan sistem pendidikan Islam: Mengenal sejarah pesantren, surau, dan meunasah di Indonesia. *Jalie: Journal of Applied Linguistics and Islamic Education*, 1(1), 146-167.
- Asri, M. (2017). Dinamika kurikulum di Indonesia. *Modeling: Jurnal Program Studi PGMI*, 4(2), 192-202.
- Baety, D. N., & Munandar, D. R. (2021). Analisis efektifitas pembelajaran daring dalam menghadapi wabah pandemi COVID-19. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(3), 880-989.
- Baharuddin, M. R. (2021). Adaptasi kurikulum merdeka belajar kampus merdeka (fokus: Model MBKM program studi). *Jurnal Studi Guru dan Pembelajaran*, 4(1), 195-205.
- Daga, A. T. (2020). Kebijakan pengembangan kurikulum di sekolah dasar (sebuah tinjauan kurikulum 2006 hingga kebijakan merdeka belajar). *Jurnal Edukasi Sumba (JES)*, 4(2), 103-110.
- Dewi, D. R. (2019). Pengembangan kurikulum di Indonesia dalam menghadapi tuntutan abad ke-21. *As-salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*, 8(1), 1-22.
- Dhaifi, A. (2017). Perkembangan kurikulum PAI di Indonesia. *Edureligia: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(1), 76-88.
- Fahrudi, E. (2021). Pendidikan akhlakul karimah berbasis karakter melalui pendekatan teori ekologi bronfenbrenner. *Premiere: Journal of Islamic Elementary Education*, 3(2), 37-53.
- Faiz, A., & Purwati, P. (2021). Koherensi program pertukaran pelajar kurikulum merdeka belajar kampus merdeka dan general education. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(3), 649-655.
- Feriver, Ş., Olgan, R., Teksöz, G., & Barth, M. (2022). Impact of early childhood education settings on the systems thinking skills of preschool children through the lens of Bronfenbrenner's theory. *Systems Research and Behavioral Science*, 39(1), 85-103.

- Hanubun, M. A., & Budiaman, B. (2019). Pro ecology behavior siswa ditinjau dari kepemimpinan instruksional (di Madrasah Aliyah Negeri 6 Jakarta Timur). *Jurnal Ilmiah Pendidikan Lingkungan dan Pembangunan*, 20(1), 1-16.
- Insani, F. D. (2019). Sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga saat ini. *As-salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*, 8(1), 43-64.
- Irawati, D., Najili, H., Supiana, S., & Zaqiah, Q. Y. (2022). Merdeka belajar curriculum innovation and its application in education units. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(2), 2506-2514.
- Junaidi, R., Ali, T. I. M. T. M., & Mamat, M. (2019). Perubahan persekitaran mempengaruhi kanak-kanak dalam novel terpilih. *Rumpun Jurnal Persuratan Melayu*, 7(1), 125-151.
- Kaharuddin, K. (2021). Kualitatif: Ciri dan karakter sebagai metodologi. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 9(1), 1-8.
- Kholis, N., & Karimah, R. (2017). Aksi budaya teo-ekologi melalui integrasi kurikulum pendidikan lingkungan hidup. *Al-tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 17(2), 451-470.
- Kurniati, E., Sari, N., & Nurhasanah, N. (2021). Pemulihan pascabencana pada anak usia dini dalam perspektif teori ekologi. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(2), 579-587
- Marisa, M. (2021). Inovasi kurikulum "Merdeka Belajar" di era society 5.0. *Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan, dan Humaniora*, 5(1), 66-78.
- Muhyatun, M. (2019). Konseling ekologi Bronfenbrenner dalam pengembangan kecerdasan spiritual sebagai fitrah anak (spiritual intelligence). *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, 9(2), 149-161.
- Nasution, S. M. (2021). Pendekatan komunitas untuk membangun resiliensi di masa pandemi COVID-19. *IJIP: Indonesian Journal of Islamic Psychology*, 3(2), 175-196.
- Oke, A., & Fernandes, F. A. P. (2020). Innovations in teaching and learning: Exploring the perceptions of the education sector on the 4th industrial revolution (4IR). *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 6(2), 1-22.
- Pratiwi, I. (2019). Efek program PISA terhadap kurikulum di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 4(1), 51-71.
- Rahayu, Y. M. (2017). Pengaruh perubahan kurikulum 2013 terhadap perkembangan peserta didik. *Logika Jurnal Ilmiah Lemlit Unswagati Cirebon*, 18(3), 22-42.
- Ramadina, E. (2021). Peran kepala sekolah dalam pengembangan kurikulum merdeka belajar. *Mozaic: Islam Nusantara*, 7(2), 131-142.
- Riska, R., & Hudaidah, H. (2021). Sistem pendidikan di Indonesia pada masa Portugis dan Belanda. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(3), 824-829.
- Ritonga, M. (2018). Politik dan dinamika kebijakan perubahan kurikulum pendidikan di Indonesia hingga masa reformasi. *Bina Gogik: Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 5(2), 88-102.
- Sabriadi, H. R., & Wakia, N. (2021). Problematika implementasi kurikulum merdeka belajar di perguruan tinggi. *Adaara: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 11(2), 175-184.
- Salsabila, U. H. (2018). Teori ekologi Bronfenbrenner sebagai sebuah pendekatan dalam pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. *Al-Manar: Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam*, 7(1), 139-158.
- Setiawan, H. H., Wardianti, A., Yusuf, I., & Azikin, A. (2020). Anak sebagai pelaku terorisme dalam perspektif ekologi sosial. *Sosio Informa*, 6(3), 252-263.
- Suhardi, M., Mulyono, S., Syakhrani, H., Aslan, A., & Putra, P. (2020). Perubahan kurikulum lembaga pendidikan Islam di Sambas pada masa Kesultanan Sambas. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 9(1), 1-15.
- Sumantri, B. A. (2019). Pengembangan kurikulum di Indonesia menghadapi tuntutan kompetensi abad 21. *El-hikmah: Jurnal Kajian dan Penelitian Pendidikan Islam*, 13(2), 146-167.
- Supriyadi, A. (2021). Pelatihan strategi menulis proposal hibah kurikulum merdeka belajar-kampus merdeka. *Jurnal Abdimas Prakasa Dakara*, 1(1), 25-28.
- Tikkanen, L., Pyhältö, K., Soini, T., & Pietarinen, J. (2017). Primary determinants of a large-scale curriculum reform: National board administrators' perspectives. *Journal of Educational Administration*, 55(6), 702-716.